



Jangan Hanyut

KETUA DPRD Kota Pontianak Hartono Azas bergembira atas predikat WTP yang diraih Pemkot Pontianak. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari kerjasama semua pihak yang terus meningkatkan sinergitas antar instansi dan lembaga.

"Kita bersyukur, bergembira dan memberikan apresiasi kepada pemerintah kota serta DPRD yang sama-sama turut menciptakan nilai tersebut. Artinya, kita terima rapor dengan nilai yang memuaskan. Tapi kita tidak boleh hanyut, justru ini memacu dan memotivasi untuk terus menerus mematuhi aturan mana yang kurang. Karena ini

■ **Bersambung ke Hal. 15**

DATA.ORKY

Jangan Hanyut

yang ketiga kalinya," ujar Azas kepada *Tribun*, Senin (2/6).

Setiap tahun, katanya, selang tiga tahun terakhir selalu menerima rapor dan nilainya WTP dengan paragraf penjelas.

"Ada hal-hal yang di besarkan sesuai dengan saran BPK. Audit itu sendiri banyak aspek, kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan menyangkut standar akuntansi

kepemrintahan," katanya.

Menyangkut paragraf penjelasan, lanjut Azas, pembenahan manajemen aset, serta piutang PBB harus segera ditindaklanjuti sesuai tenggat waktu yang ada.

"Artinya kita sebagai perpanjangantangan dengan BPK dalam suatu MoU untuk menindaklanjuti dari sisi penawasannya," terangnya.

"Tentu ini akan kami bahas, minta eksekutif melalui peringkatnya menyangkut SKPD mana, agar segera menindaklanjuti rekomendasi audit BPK tersebut," imbuhnya.

Menurutnya, sebelum diterima memang diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi segala admistrasi yang ada. Namun secara perundangan-unda-

Sambungan Hal. 9

ngan, setelah terima LHP ada tenggat waktu 60 hari untuk menindaklanjuti hal tersebut.

"Yang lebih spesifik, karena kita dapat WTP dengan beberapa paragraf penjelas. DPRD tentu meminta kepala daerah untuk membenahi dan melengkapi. Yang jelas status predikat tersebut, bukan kerja individu, tetapi antara DPRD dan eksekutif," pungkasnya. (qky)